



Pengaruh Teknologi Informasi, Kompetensi Auditor dan Beban Kerja Auditor Terhadap Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara

Anas Zunaidi¹, Abdul Majid Bakri², Syamsuddin Bidol³

¹ Mahasiswa Magister Manajemen, Universitas Fajar, Makassar

^{2,3} Dosen Magister Manajemen, Universitas Fajar, Makassar

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of information technology, auditor competency, and auditor workload on the effectiveness of the supervision of the Regional Inspectorate in North Penajam Paser Regency. The research method used is quantitative using Multiple Linear Regression data analysis with SPSS software. In this study, researchers used a saturated sampling technique because the population was quite small, namely 31 respondents. Primary data was obtained from questionnaires as a data collection tool for 31 Auditors/PPUPD Regional Inspectorates of North Penajam Paser Regency. The results of the research show that partially there is a positive influence between information technology on the effectiveness of supervision of the Regional Inspectorate of North Penajam Paser Regency, however, auditor competency and auditor workload do not influence the effectiveness of supervision of the Regional Inspectorate of North Penajam Paser Regency. However, simultaneously information technology, auditor competency and auditor workload have a positive effect on the effectiveness of the supervision of the North Penajam Paser Regency Regional Inspectorate. So this research recommends that the effective use of information technology, developing auditor competency, and reducing auditor workload can increase the effectiveness of the supervision of the Regional Inspectorate in North Penajam Paser Regency.

Keywords: Information Technology; Auditor Competency; Auditor Workload; Supervision Effectiveness.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh teknologi informasi, kompetensi auditor, dan beban kerja auditor terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis data Regresi Linear Berganda dengan software SPSS. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel jenuh karena jumlah populasi yang cukup kecil, yaitu sejumlah 31 responden. Data primer diperoleh dari kuesioner sebagai alat pengumpulan data kepada 31 Auditor/PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif antara teknologi informasi terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, namun kompetensi auditor dan beban kerja auditor tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Walau demikian Secara simultan teknologi informasi, kompetensi auditor dan beban kerja auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. sehingga penelitian ini merekomendasikan bahwa penggunaan teknologi informasi yang efektif, pengembangan kompetensi auditor, dan pengurangan beban kerja auditor dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kata Kunci: Teknologi Informasi; Kompetensi Auditor; Beban Kerja Auditor; Efektivitas Pengawasan.

Article info

Received (18/09/2024)

Revised (25/10/2024)

Accepted (13/11/2024)

Corresponding_ anas.itkab@gmail.com

DOI: 10.47354/mjo.v5i1

I. PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, merupakan implementasi reformasi dalam pemerintahan dengan fokus pada otonomi daerah, peningkatan pelayanan masyarakat, menjaga keutuhan NKRI melalui pembangunan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah.

Inspektorat Daerah merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta penyelewengan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pasal 33 ayat (5) bahwa Inspektorat Daerah kabupaten/ kota dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi : Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/ wali kota dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; Penyusunan laporan hasil pengawasan; Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Daerah merupakan salah satu unit kerja yang melakukan pengawasan pada pemerintahan daerah, dimana memiliki tugas yang sama dengan auditor internal. Sehingga, Inspektorat Daerah memegang peranan penting dalam proses terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Pentingnya pengawasan dalam pemerintahan Daerah diwujudkan melalui lembaga Inspektorat yang bertugas melakukan pengawasan di tingkat daerah, hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara (Perbup-PPU,2017).

Inspektorat Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, pembinaan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tugas tambahan (audit, review kebijakan pemerintah daerah, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya). Inspektorat Daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mengungkapkan potensi penyimpangan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah diberikan. Namun, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah tidak selalu mencapai hasil yang optimal. Faktor-faktor seperti kurangnya teknologi informasi, tingkat kompetensi, keterbatasan sumber daya atau adanya tekanan politik dapat mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan ini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah sangat penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan efektivitas pengawasan yang tinggi, potensi terjadinya korupsi dan penyelewengan keuangan daerah dapat diminimalkan.

Efektivitas pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah sangat penting bagi terlaksananya pemerintahan daerah yang baik. Pengawasan pemerintah daerah dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi publik benar-benar menjalankan kegiatannya secara efisien dan efektif. Namun kenyataannya, pengawasan Inspektorat Daerah masih menghadapi kendala. Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum cukup berintegritas dan memiliki kapabilitas, serta belum benar-benar independen, dan kebutuhan jumlah personel aparat pengawasan belum terpenuhi. Ditambah lagi banyaknya tugas mandatoris dari pusat yang dibebankan pada Inspektorat Daerah, salah satunya melakukan tindak lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel). Teknologi

informasi baik secara implisit maupun eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia (Pasal 1 ayat 2 UU nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Tidak bisa dipungkiri bahwa tuntutan publik akan pelayanan pemerintah yang cepat, tepat waktu dan transparan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk merealisasikannya. Salah satu faktor yang bisa menjawab tantangan ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi ini untuk mengoptimalkan kegiatan operasional yang mampu membantu proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Karena teknologi informasi memegang peran dalam memangkas birokrasi yang berbelit, maka efektivitas dan efisiensi kerja organisasi akan semakin meningkat.

Kompetensi auditor mempengaruhi Efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah. Pengetahuan, pendidikan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, merupakan kemampuan profesional yang diperlukan auditor untuk melaksanakan tanggungjawab profesionalnya secara efektif (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia 2014).

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2007:110). Orang yang berkompoten adalah orang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Untuk dapat memiliki keterampilan, seorang auditor harus selalu memperbarui pengetahuan tentang pengawasan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi, salah satunya dengan memperbanyak pelatihan teknis yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit.

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sebanyak 56 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Sekretariat Daerah	Jumlah
Aparatur Sipil Negara (ASN)	43
1. Inspektur Daerah	1
2. Sekretaris	1
3. Irban Bid. Pemerintahan dan Aparatur	1
4. Irban Bid. Kesejahteraan Masyarakat	1
5. Irban Bid. Ekonomi dan Pembangunan	1
6. KaSubbag. Keuangan dan Perencanaan	1
7. KaSubbag. Umum dan Kepegawaian	1
8. Jabatan Fungsional Auditor	21
9. Jabatan Fungsional PPUPD	5
10. Jabatan Fungsional Lainnya	9
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1
Tenaga Harian Lepas (THL)	13
Jumlah	56

Sumber : Data pegawai Itda.2023

Sebanyak 26 orang yang semuanya telah memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan sertifikasi Jabatan Fungsional PPUPD. sedangkan untuk jumlah APIP (Aparat Pengawas Instern Pemerintah) untuk seluruh populasi yang ASN (Aparatur Sipil Negara) di Inspektorat sebanyak 43 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 13 orang (Data Pegawai Itda, 2023).

Jabatan Struktural dan Fungsional di Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kasubbag Keuangan dan Perencanaan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli Pertama, PPUPD Madya, PPUPD Muda, Pengadministrasi Umum, Analisis Hukum, Analisis Keuangan, Verifikator Keuangan, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pelaksana, Pengadministrasi Persuratan (Data Pegawai Inspektorat Daerah 2023).

Menurut Dhania (2010:16) dalam Alfian (2017:88) beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Menurut

Munandar (2001), beban kerja adalah suatu keadaan di mana karyawan dibebankan tugas yang wajib diselesaikannya dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, menurut pernyataan Wickens (2002), pengertian beban kerja adalah sebuah kombinasi antara ketersediaan sumber daya dalam proses bisnis, tuntutan pekerjaan, serta kemampuan dalam bekerja.

Singkatnya, pengertian beban kerja adalah suatu tugas yang dibebankan kepada karyawan, sehingga menjadi tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikannya dalam waktu tertentu. Umumnya, saat karyawan merasa tidak sanggup untuk melakukan pekerjaan di luar kemampuannya, itulah yang menjadi beban kerja. Namun, apabila karyawan sanggup mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, hal tersebut tidak lagi menjadi beban kerja.

Berdasarkan fakta yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terkait dengan efektivitas pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
2. Masih kurangnya penggunaan media teknologi informasi seperti aplikasi yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait pengawasan, sehingga hal tersebut mengakibatkan proses pengawasan menjadi lebih lama dan kualitas Laporan juga kurang sempurna. Oleh karena itu penting sekali penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan,
3. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam bentuk Diklat, Bimtek dan pelatihan yang lainnya untuk peningkatan kompetensi Auditor masih sangat terbatas, yang disebabkan oleh kurangnya anggaran pengembangan kompetensi di Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sering terjadi mendapatkan penugasan baru yang belum pernah kita lakukan sama sekali, dan tanpa ada pelatihan terkait penugasan tersebut. Sehingga tidak bisa optimal dalam pelaksanaan penugasan.
4. Sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan belanja daerah oleh Perangkat Daerah, baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa masih didapat temuan-temuan yang berulang, salah satu contoh untuk kegiatan pekerjaan fisik adalah temuan kekurangan volume pekerjaan, mark up (kemahalan) harga dan belanja modal fiktif. Hal tersebut masih sering terjadi, dikarenakan pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya tidak melakukan pekerjaannya secara maksimal sehingga pada pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak terpantau dengan baik dan Pejabat pengadaan tidak melakukan survey harga pasar atas item pekerjaan. Terhadap temuan yang berakibat pengembalian ke Kas Daerah pun tidak membuat jera Perangkat Daerah, justru cenderung acuh tak acuh terhadap temuan hasil pemeriksaan, sehingga tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Hal inilah yang menjadi salah satu beban pekerjaan yang berlarut-larut.
5. Inspektorat belum dianggap sebagai mitra oleh perangkat daerah, namun sebagai pencari kesalahan. Akibatnya seringkali pada saat melakukan pengawasan, tim pemeriksa diacuhkan. Tidak jarang Penyerahan dokumen pemeriksaan juga lambat. Hal ini juga yang menjadi pekerjaan yang harusnya selesai tepat waktu menjadi terlambat.
6. Pelaksanaan reviu-reviu seperti reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sangat dibutuhkan hasilnya oleh Perangkat Daerah untuk pencairan DAK setiap tahapnya, itupun dokumen persyaratan sering sekali belum lengkap s/d menjelang batas akhir pengajuan. Yang akhirnya tim Inspektorat mau tidak mau harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan laporan dalam waktu sangat singkat.
7. Sering kali mendapatkan penugasan tumpang tindih, hal ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya amanah yang dilimpahkan ke Inspektorat Daerah baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi yang tidak didukung dengan sumber daya manusia dan jumlah anggaran yang memadai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Pasolong (2007), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Robbins dalam Tika (2008) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran 10 untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gibson dalam Tangkilisan (2005) mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui yaitu Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; Kejelasan strategi pencapaian tujuan; Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap; Perencanaan yang matang; Penyusunan program yang tepat; Tersedianya sarana dan prasarana; Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Pengawasan

Kamus Besar Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “Awas” yang artinya memperhatikan baik baik, dalam arti sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi (Sujanto, 1986). Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan (Yosa, 2010). Sedangkan menurut Basu swasta, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan (Ibid). Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (Saiful, 2004).

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, Inspektorat Daerah menjadi fokus penelitian karena bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Inspektorat Daerah merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk mewujudkan penerapan Clean Governance pada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan perkembangannya, selain sebagai unsur evaluator, Inspektorat juga diharapkan mampu menjadi katalisator dan konsultan. Untuk mencapai harapan tersebut maka jelas diperlukan sumber daya manusia yang cukup, berkompeten dan berintegritas untuk mengisi posisi sebagai auditor internal pada Inspektorat Daerah.

Teknologi Informasi

Menurut Warsita (2008) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lantip dan Riyanto (2011) teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya sangat pesat. Uno dan Lamatenggo (2011) juga mengemukakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

Kompetensi

Pengertian kompetensi ini merupakan gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian seseorang sehingga mampu meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi untuk keberhasilan organisasi. Selain itu, kompetensi juga memiliki arti kapasitas yang ada pada seseorang dan dapat membuat orang tersebut bisa untuk memenuhi apa yang diisyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan. Secara umum, kompetensi merupakan suatu kemampuan maupun kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang disandangnya.

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan (Badan Nasional Sertifikasi Profesi, 2014). Dari (IAPI, 2016) mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan profesional seorang auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas-tugas baik secara individu maupun dalam tim, sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik, dan peraturan hukum yang berlaku. Auditor memperoleh kompetensi melalui pendidikan di bidang akuntansi, pelatihan profesional, dan pengalaman kerja yang teraplikasikan. IAPI mengakui kompetensi auditor melalui sertifikasi profesi.

Menurut Gordon (1998) menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi, yakni: Pengetahuan (*Knowledge*); Pemahaman (*Understanding*); Kemampuan (*Skill*); Nilai (*Value*); Sikap (*Attitude*); Minat (*Interest*).

Beban Kerja

Menurut Dhania dalam Alfian (2017) beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Vanchapo (2020) beban kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam

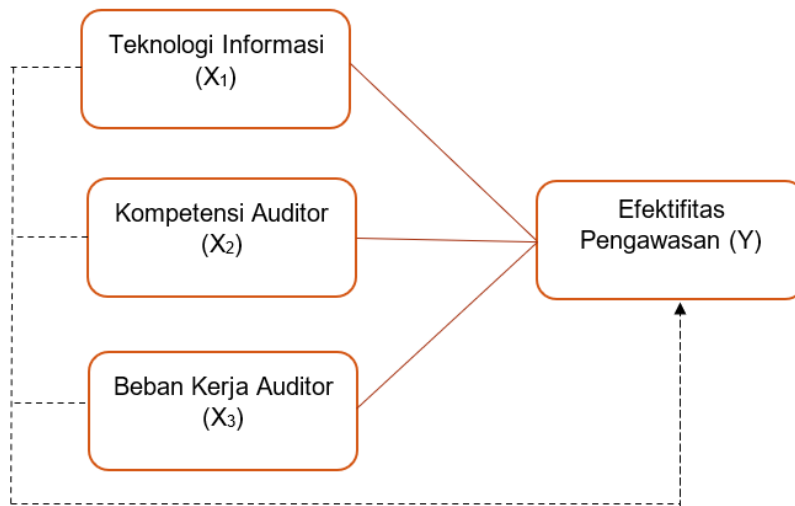
jangka waktu tertentu. Dari pendapat ahli mengenai beban kerja, dapat disimpulkan bahwa beban kerja merupakan sebuah tuntutan tanggung jawab pekerjaan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Putra dalam Rolos (2018) terdapat 4 indikator beban kerja, antara lain Target yang harus dicapai, Kondisi Pekerjaan, Penggunaan Waktu, dan Standar Pekerjaan

Kerangka Konseptual

Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lembaga pengawas dengan aparatur fungsional yang bertanggungjawab kepada Bupati. Hal ini berarti kegiatan pengawasan yang dilakukan bersifat internal yakni pemeriksaan kegiatan atau urusan pemerintahan daerah. Dari sejumlah hasil penelitian yang terkait pengawasan inspektorat daerah masih belum ditemukan sejumlah penjelasan yang menjelaskan secara mendalam mengenai Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu terdapat variabel independen yaitu Teknologi Informasi (X₁), Kompetensi Auditor (X₂), Beban Kerja Auditor (X₃), dan variabel dependen yaitu Efektifitas Pengawasan (Y). Berikut gambar kerangka konseptual dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini strategi penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X (variabel bebas) yang terdiri atas teknologi informasi (X₁), kompetensi auditor (X₂) dan beban kerja auditor (X₃), terhadap variabel Y (variabel terikat) yaitu Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara baik secara parsial maupun simultan.

Lokasi Penelitian adalah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan September Tahun 2023 hingga selesai. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel jenuh karena jumlah populasi yang cukup kecil, yaitu sejumlah 31 orang. Maka sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh jumlah populasi untuk digunakan sebagai responden, sehingga sampel menjadi 31 orang, yang terdiri dari Auditor/ PPUPD dan Calon Auditor/ PPUPD.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei, dimana penulis membagikan kuesioner untuk pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

IV. HASIL/TEMUAN

Uji Normalitas

Uji normalitas ditujukan dalam melakukan pengujian terhadap model regresi sehingga dapat diketahui jika variabel residual berdistribusi secara normal. Untuk uji statistik “non-parametrik Kolmogorov-Smirnov, terdapat kategori dalam mengambil keputusan yaitu Apabila hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov didapatkan signifikan > 0.05 maka disimpulkan bahwa data “terdistribusi dengan normal”. Dan Apabila hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov didapatkan signifikan < 0.05 maka disimpulkan bahwa data “tidak terdistribusi dengan normal”.

Tabel 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.96284270
	Absolute Positive	.093
	Absolute Negative	.093
Most Extreme Differences	Negative	-.082
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 - b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction.
 - d. This is a lower bound of the true significance.
- Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov diatas didapat nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ditujukan untuk diketahuinya apakah model regresi terdapat korelasi variable bebas dan tidak. Jika terdapat korelasi, maka dapat dikatakan problem multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas ini terlihat dari nilai tolerance dan lawannya varian inflation factor (VIF). Nilai cut off yang digunakan adalah mempunyai angka tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.640	5.478		2.308	.029		
	Teknologi Informasi	.456	.145	.496	3.144	.004	.800	1.251
	Kompetensi	.441	.240	.352	1.834	.078	.541	1.848
	Beban Kerja	-.175	.213	-.144	-.825	.417	.649	1.542

a. Dependent Variable: Efektifitas Pengawasan

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dihasilkan Nilai tolerance yang tinggi (0,800) dan VIF yang rendah (1,251) menunjukkan bahwa variabel Teknologi Informasi tidak memiliki hubungan linier yang signifikan dengan variabel independen lainnya. Kompetensi Auditor juga memiliki nilai tolerance yang cukup baik (0,541) dan VIF di bawah 10 (1,848), menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel ini dengan variabel lainnya. Beban Kerja Auditor memiliki tolerance yang cukup baik (0,649) dan VIF yang rendah (1,542), yang juga menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.

Dapat disimpulkan dari hasil uji ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model yang dianalisis. Nilai Tolerance untuk setiap variabel berada di atas batas 0,2, dan VIF di bawah 10, yang mengindikasikan bahwa setiap variabel independen (Teknologi Informasi, Kompetensi Auditor, Beban Kerja

Auditor) tidak saling mempengaruhi satu sama lain secara signifikan. Ini memungkinkan model regresi berjalan dengan baik tanpa bias yang disebabkan oleh korelasi antar-variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk permodelan regresi agar diketahui apakah terdapat ketidaksesuaian variance dari residual satu dengan lainnya. Jika varian residual satu pengamat ke lainnya bernilai tetap, maka dapat dikatakan homoskedastisitas namun jika berbeda maka dinilai sebagai heterokedastisitas. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengetahui heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser. Pengujian glejser menyarankan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variable independent. Nilai probabilitas dapat disebut signifikan jika bernilai di atas 0.05. ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu :

1. Uji glejser

Tujuan dari uji heteroskedastisitas (Glejser) adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasarnya adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4. Uji Glejser

Coefficients^a

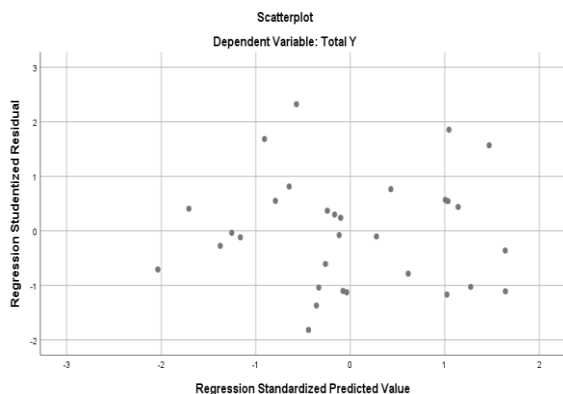
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.964	3.038		.647	.523
	Teknologi Informasi	.011	.081	.028	.139	.890
	Kompetensi	.162	.133	.302	1.219	.233
	Beban Kerja	-.192	.118	-.369	-1.632	.114

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan dari hasil uji diatas dapat diperoleh hasil uji diantaranya bahwa Variable X1 (Teknologi Informasi) memiliki nilai signifikansi 0,890 > 0,05 yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas; Variabel X2 (Kompetensi) memiliki nilai signifikansi 0,233 > 0,05 yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas; Variabel X3 (Beban Kerja) memiliki nilai signifikansi 0,114 > 0,05 yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas.

2. Uji scatterplot.



Gambar 2. Hasil Uji Scatterplot

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak dan tidak berpola diatas garis 0 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji t (Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y). dengan dasar pengambilan keputusan yaitu Jika nilai sig < 0,05, atau t hitung > t table maka terdapat pengaruh variable X terhadap variable Y; Jika nilai sig > 0,05, atau t hitung < t table maka tidak terdapat pengaruh variable X terhadap variable Y;

$$t \text{ table} = t (\alpha/2 ; n-k-1) = t (0,025 ; 31-3-1)$$

$$= t (0,025 ; 27) = \mathbf{2,052}$$

Tabel 5. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.640	5.478		2.308	.029
	Teknologi Informasi	.456	.145	.496	3.144	.004
	Kompetensi	.441	.240	.352	1.834	.078
	Beban Kerja	-.175	.213	-.144	-.825	.417

a. Dependent Variable: Efektifitas Pengawasan

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung (3.144) lebih besar dari t tabel (2,052), maka X1 (Teknologi Informasi) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nilai t hitung (1.834) lebih kecil dari t tabel (2,052), maka X2 (Kompetensi Auditor) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai t hitung (-0.825) lebih kecil dari t tabel (2,052), sehingga X3 (Beban Kerja Auditor) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya variabel *Teknologi Informasi (X1)* yang berpengaruh signifikan terhadap Y, sementara variabel *Kompetensi Auditor (X2)* dan *Beban Kerja Auditor (X3)* tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y), dengan dasar pengambilan keputusan yaitu Jika nilai sig < 0,05, atau F hitung > F table maka terdapat pengaruh variable X secara simultan terhadap variable Y; Jika nilai sig > 0,05, atau t hitung < F table maka tidak terdapat pengaruh variable X secara simultan terhadap variable Y;

$$F \text{ table} = F (k ; n-k) = F (3 ; 31-3) = F (3 ; 28) = \mathbf{2,947}$$

Hasil out put dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	226.324	3	75.441	7.735	.001 ^b
	Residual	263.353	27	9.754		
	Total	489.677	30			

a. Dependent Variable: Efektifitas Pengawasan
b. Predictors: (Constant), Beban Kerja, Teknologi Informasi, Kompetensi

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai sig 0,001 < 0,05 dan F hitung 7,735 > F tabel 2,947 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variable X secara simultan (Bersama-sama) terhadap variable Y.

Koefisien diterminasi (R2)

Koefisien diterminasi dimanfaatkan untuk melakukan pengukuran terhadap seberapa jauh model dalam menjelaskan variabel terikat. Koefisien diterminasi memiliki nilai dari nol hingga satu. Apabila nilai R2 kecil, maka variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen ternilai terbatas, sedangkan apabila nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel bebas dapat menjelaskan variable dependen dan meramalkan variabel dependen tersebut. Koefisien diterminasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variable bebas (X) secara simultan terhadap variable terikat (Y).

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Diterminasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680 ^a	.462	.402	3.123
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja, Teknologi Informasi, Kompetensi				

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai R Square sebesar 0,462, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variable X1 (Teknologi Informasi), X2 (Kompetensi Auditor) dan X3 (Beban Kerja Auditor) secara simultan (Bersama-sama) terhadap variable Y (Efektivitas Pengawasan) adalah sebesar 46,2%.

V. PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode kuantitatif dengan dukungan aplikasi SPSS, berikut ini adalah hasil dari penelitian Pengaruh Teknologi Informasi, Kompetensi Auditor dan Beban Kerja Auditor terhadap Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Efektifitas Pengawasan Inspektorat Daerah

Dari hasil analisis data terkait indikator yang yang digunakan pada variable ini bahwa relevansi, Akurasi, Ketepatan waktu dan manfaat yang ditimbulkan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah.

Menurut hasil penelitian yang telah peneliti lakukan didapatkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai (t hitung) adalah sebesar 3.144 > dengan t tabel 2.052. Signifikansi variabel teknologi informasi terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah sebesar 0.000 atau lebih kecil dari nilai taraf signifikansi (α) 0.05 artinya teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah. Dari berbagai perhitungan baik dari uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokesdatisitas), uji hipotesis (uji t, uji f, dan koefisien diterminasi) diperoleh kesimpulan bahwa X1 (teknologi informasi) memiliki pengaruh yang positif, searah dan signifikan terhadap Y (efektivitas pengawasan) baik dilakukan secara terpisah (parsial) maupun bersama-sama (simultan). Terjadinya pengaruh positif antara X1 (teknologi informasi) dengan Y (efektivitas pengawasan) karena jika variabel teknologi informasi ditingkatkan maka variabel efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah pun akan mengalami peningkatan.

Uno dan Lamatenggo (2011) mengemukakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

Sebagaimana teori tersebut di atas teknologi informasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah berupa aplikasi pengawasan maupun aplikasi penunjang yang selama ini dipakai secara mandiri dengan memperhatikan faktor-faktor:

1. Relevansi atas aplikasi pengawasan, dimana aplikasi yang dikelola merupakan kebutuhan dalam pekerjaan yang rutin dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara baik strategis, teknis maupun penunjang. Saat ini Inspektorat Daerah telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi, salah satu contohnya adalah aplikasi system pengawasan pengelolaan keuangan desa (SISWASKEUDES), Aplikasi E-Kinerja, Aplikasi E-Office dan Aplikasi TLHP.
2. Akurasi yang terjamin. Hal ini menyangkut dengan ketepatan data sehingga tidak terjadi tumpang tindih item belanja dan nilai yang berkesesuaian dengan riil belanja beserta pajak-pajaknya. Ketepatan ini dapat lebih terjaga dengan memanfaatkan teknologi informasi utamanya dalam pelaksanaan pengawasan yang memerlukan perhitungan kompleks. Akurasi juga menyangkut koordinasi dengan Perangkat Daerah sehingga diperoleh database yang valid untuk pelaksanaan pengawasan dan dapat terbaca langsung oleh sistem informasi yang ada.
3. Ketepatan waktu merupakan elemen yang berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan. Dengan adanya teknologi informasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara akan mampu mempersingkat penyelesaian pengawasan, sehingga akan mengurangi penugasan pengawasan yang tumpang tindih.

4. Manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya teknologi informasi adalah, pertama : meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dengan memungkinkan penggunaan sistem yang lebih efektif dan efisien dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan data. Kedua : memungkinkan pengawasan yang lebih akurat dan cepat dengan menggunakan alat-alat yang dapat memantau dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka menjadi besar. Ketiga : memungkinkan pengawasan yang lebih transparan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada informasi dan data, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan.

Dengan demikian, teknologi informasi sangat penting dalam meningkatkan efektifitas pengawasan, terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti penggunaan teknologi digital yang semakin luas dan kompleks.

Pengaruh Kompetensi terhadap Efektifitas Pengawasan Inspektorat Daerah

Menurut hasil penelitian ini, kompetensi auditor tidak berpengaruh secara parsial terhadap efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah dengan t hitung sebesar $1.834 < t$ tabel 2.025 dan signifikansi variabel kompetensi auditor terhadap efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah sebesar 0.078 atau lebih besar dari nilai taraf signifikansi (α) 0.05 . Variabel X2 (kompetensi auditor) tidak memiliki pengaruh yang positif, searah dan signifikan terhadap Y (efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah). Namun secara simultan (Bersama-sama), variable X2 (kompetensi auditor) terjadinya pengaruh positif terhadap Y (efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah). Sehingga jika variabel X2 (kompetensi auditor) Bersama-sama dengan variable X1 (teknologi informasi) dan X3 (beban kerja auditor) ditingkatkan maka variabel Y (efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah) pun akan mengalami peningkatan.

Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI 2016 mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan profesional seorang auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas-tugas baik secara individu maupun dalam tim, sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik, dan peraturan hukum yang berlaku.

Kompetensi auditor dalam penelitian ini berupa tingkat pengetahuan dan pemahaman atas tugas pokok dan fungsi, kemampuan dan keterampilan dalam mengoperasikan alat kerja, motivasi atas pekerjaan yang dijalani merupakan bentuk kualitas untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya, sikap kerja dalam pelaksanaan penugasan pengawasan dengan bekerja mengedepankan etika dan kode etik sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta minat atas pekerjaan yang dijalani merupakan bentuk kualitas untuk melaksanakan tugas sesuai jabatannya. Kualitas pegawai menjadi salah satu faktor yang bisa menentukan tingkat efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagaimana yang terlihat dalam penelitian ini bahwa walaupun kompetensi auditor secara parsial tidak berpengaruh terhadap peningkatan efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah, namun secara simultan (Bersama-sama) dengan variable X yang lain memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah, sehingga peningkatan kompetensi auditor menjadi salah satu kebutuhan bagi Inspektorat Daerah.

Pengaruh Beban Kerja terhadap Efektifitas Pengawasan Inspektorat Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini, beban kerja auditor tidak berpengaruh secara parsial terhadap efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah dengan t hitung sebesar $-0.825 < t$ tabel 2.025 dan signifikansi variabel beban kerja auditor terhadap efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah sebesar 0.417 atau lebih besar dari nilai taraf signifikansi (α) 0.05 . Variabel X3 (beban kerja auditor) tidak memiliki pengaruh yang positif, searah dan signifikan terhadap Y (efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah). Namun secara simultan (Bersama-sama), variable X3 (beban kerja auditor) terjadinya pengaruh positif terhadap Y (efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah). Sehingga jika variabel X3 (beban kerja auditor) Bersama-sama dengan variable X1 (teknologi informasi) dan X2 (kompetensi auditor) ditingkatkan maka variabel Y (efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah) pun akan mengalami peningkatan.

Menurut Vanchapo (2020) beban kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu. Hasil penelitian Muhammad Rayhan, Azwar, Anwar M (2022), dengan judul "pengaruh Beban Kerja dan Fasilitas Kerja terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi pada PT Wieda Sejahtera" menunjukkan bahwa Hubungan antara beban kerja dengan efektifitas kerja berdasarkan uji statistik parsial diperoleh nilai $-2,262 < t$ tabel $2,073873$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$. Dengan nilai signifikansi dibawah $0,05$ tersebut menunjukkan bahwa beban kerja (X1) memiliki pengaruh terhadap efektifitas kerja (Y). Arah koefisien regresi negatif yang signifikan terhadap efektifitas kerja (Y).

Hal tersebut menunjukkan bahwa beban kerja memiliki hubungan yang signifikan dan tidak searah dengan efektifitas kerja karyawan bagian produksi PT Wieda Sejahtera. Semakin tinggi tingkat beban kerja, maka semakin rendah tingkat efektifitas kerja dan sebaliknya semakin rendah tingkat beban kerja, maka semakin tinggi tingkat efektifitas kerja. Ini artinya jika perusahaan dapat memperhatikan berbagai aspek beban kerja yang diharapkan para karyawan bagian produksi seperti menambah jumlah karyawan, alokasi waktu kerja dan lain-lain, maka pada saat itu pula perusahaan secara langsung dapat meningkatkan efektifitas kerja para karyawannya dengan baik.

Pengaruh Teknologi Informasi, Kompetensi dan Beban Kerja terhadap Efektifitas Pengawasan Inspektorat Daerah

Sesuai dengan hasil penelitian ini, terdapat pengaruh signifikan antara teknologi informasi, kompetensi auditor dan beban kerja auditor secara simultan (Bersama-sama) terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini dibuktikan melalui nilai F hitung sebesar 7.735 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F tabel pada tabel distribusi F sebesar 2.947 dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ 7.735 > 2.947. Signifikansi variabel X (teknologi informasi, kompetensi auditor dan beban kerja auditor) terhadap variable Y (efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah) sebesar 0.001 atau lebih kecil dari nilai taraf signifikansi (α) 0.05 artinya variabel X (teknologi informasi, kompetensi auditor dan beban kerja auditor) berpengaruh terhadap variable Y (efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah).

Teknologi informasi, kompetensi auditor dan beban kerja auditor merupakan hal yang patut mendapat perhatian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Karena berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, Inspektorat Daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan pemerintahan daerah, pembinaan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota; dengan tugas dan fungsi pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah, maka variabel X (teknologi informasi, kompetensi auditor dan beban kerja auditor) terhadap variable Y (efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah) memiliki pengaruh yang simultan (bersama-sama) guna terciptanya peningkatan efektivitas pengawasan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai (t hitung) adalah sebesar 3.144 > dengan t tabel 2.052. Signifikansi variabel teknologi informasi terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah sebesar 0.000 atau lebih kecil dari nilai taraf signifikansi (α) 0.05 artinya teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah;
2. Kompetensi auditor tidak berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah dengan t hitung sebesar 1.834 < t tabel 2.025 dan signifikansi variabel kompetensi auditor terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah sebesar 0.078 atau lebih besar dari nilai taraf signifikansi (α) 0.05. Variabel X2 (kompetensi auditor) tidak memiliki pengaruh yang positif, searah dan signifikan terhadap Y (efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah);
3. Beban kerja auditor tidak berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah dengan t hitung sebesar -0.825 < t tabel 2.025 dan signifikansi variabel beban kerja auditor terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah sebesar 0.417 atau lebih besar dari nilai taraf signifikansi (α) 0.05. Sehingga Variabel X3 (beban kerja auditor) tidak memiliki pengaruh yang positif, searah dan signifikan terhadap Y (efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah);
4. Terdapat pengaruh signifikan antara variable X (teknologi informasi, kompetensi auditor dan beban kerja auditor) secara simultan (Bersama-sama) terhadap variable Y (efektivitas pengawasan) Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini dibuktikan melalui nilai F hitung sebesar 7.735 > F tabel sebesar 2.947.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh Teknologi Informasi, Kompetensi Auditor dan Beban Kerja Auditor terhadap Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, peneliti memberi saran kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah untuk terus berupaya meningkatkan alat kerja dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi berupa aplikasi-aplikasi pengawasan dan melakukan peningkatan kompetensi auditor dengan memperbanyak pengembangan profesi auditor serta melakukan perumusan perencanaan penugasan yang lebih rinci dan detail sehingga pengawasan Inspektorat Daerah kabupaten Penajam Paser Utara semakin efektif.

REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 24).
- Prasojo, L.D., & Riyanto. (2011). *Teknologi Informasi Pendidikan*. Gava Media. Yogyakarta.

- Rayhan, M., Azwar., & Mustofa, A. (2022). Pengaruh Beban Kerja dan Fasilitas Kerja terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi pada PT Wieda Sejahtera. *JAProf: Jurnal Administrasi Profesional*, 3(1).
- Rolos, J.KR., Sambul, S.A.P., & Rumawas, W. (2018). Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Manado Kota. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(4).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tangkilisan, N.H. (2005). *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Uno, H.B., & Lamatenggo, N. (2011). *Teknologi komunikasi dan informasi pembelajaran*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Vanchapo, A.R. (2020). *Beban Kerja dan Stres Kerja*. Qiara Media. Pasuruan.
- Wahyu., Safar, I., Ramly, M., Amang, B., & Ramlawati. (2023). Honorary Teacher Phenomenology: The Role of Knowledge Management and Transformational Leadership. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 6(11).
- Warsita, B. (2008). *Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya*. Reneka Cipta. Jakarta.